



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

B3

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 14 Oktober 2014 No. 82

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Ir AWAN HERMAWAN PURWADINATA, M.T. |
| 2. Jabatan | : VICE PRESIDENT - TECHNICAL ENGINEERING OF INFRASTRUCTURE - DIREKTORAT PENGELOLAAN PRASARANA DAN PENGEMBANGAN |
| 3. NHK | : 97563 |
| 4. Alamat Kantor | : Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1, BANDUNG |
| 5. Tanggal Pelaporan | : 14 Juni 2012, 11 Februari 2014 |

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 285 m2 & 150 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun ---
2. Tanah seluas 158 m2, di Kabupaten BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 (Penghapusan Data Karena Dijual)

Status Laporan

| | 14 Juni 2012 | | 11 Februari 2014 |
|-----|--------------|--|------------------|
| Rp. | 773.033.000 | | Rp. 628.305.000 |
| Rp. | 628.306.000 | | Rp. 628.306.000 |
| Rp. | 144.728.000 | | ----- |

B. HARTA BERGERAK

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN
(II - III)

| | 14 Juni 2012 | 11 Februari 2014 |
|-----|---------------|-------------------|
| | ----- | ----- |
| Rp. | 1.887.107.872 | Rp. 1.687.838.015 |

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
DEPUTI

Jakarta, 2 September 2014
DIREKTORAT PENDAFTARAN
DAN PEMERIKSAAN LHKPN
DIREKTUR

TTD

ISWAN ELMI

TTD

CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.